

## PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL, TRANSPARANSI PUBLIK, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

**Dominicus Dwisantos Mete**

*Jamesmete31@gmail.com*

**Lailatul Amanah**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of functional supervision, public transparency and public accountability on local government performance. The research was quantitative. While, the population was Local Unit Organization, Alor district. Moreover, the data were primary with questionnaires as the instrument. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 38 samples from 38 Local Organization Unit, Alor district. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution). The research result concluded functional supervision did not affect local government performance. Likewise, public transparency did not affect local government performance. On the other hand, public accountability affected local government performance. In conclusion, functional supervision and public transparency within Local Unit Organization could not guarantee the development of local government performance. However, by having public accountability within local government which was accountably on the society; local government performance would be much better.*

*Keywords: functional supervision, public transparency, public accountability, local government performance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Alor. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut didapatkan sebanyak 38 sampel dari 38 OPD Kabupaten Alor. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan fungsional dan transparansi publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dan transparansi publik dalam suatu OPD tidak dapat menjamin peningkatan kinerja pemerintah daerah, namun dengan adanya akuntabilitas publik didalam lingkup pemerintahan daerah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maka akan berpengaruh pada tingkat kinerja pemerintah daerah yang semakin baik.

*Kata Kunci: functional supervision, public transparency, public accountability, local government performance*

### PENDAHULUAN

Keberadaan pemerintah dalam suatu negara merupakan suatu hal yang penting, karena kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat menjadi suatu pedoman untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu melalui pelaksanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nasional

dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju (Hasnani, 2016:16-17).

Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu desentralisasi dan penetapan desentralisasi dilakukan melalui otonomi daerah. Dengan demikian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kewenangan otonomi daerah bersifat luas, nyata, dan bertanggungjawab. Sehingga di dalam pemerintahan yang baik telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah memiliki pedoman dan sistem yang kuat untuk memastikan dan menjamin bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan dapat terlaksana dan mencapai hasil dengan baik.

Pencapaian sasaran sesuai dengan upaya untuk mewujudkan suatu iklim tata pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu pemerintahan yang dapat menjalankan amanah dari rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah tersebut kepada rakyat. Hal ini dapat mewujudkan transparansi yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah, dan masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Namun kondisi ini dalam kenyataannya belum terwujud sebagaimana yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan adanya temuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan kabar yang membuat publik tercengang. Hadir di gedung Parlemen pada Senin 4 November 2019 untuk mengikuti rapat evaluasi kinerja 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa terdapat penyimpangan yang berkaitan dengan penyelewengan dana desa. Sebab, dari laporan yang diterima mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, terdapat desa baru yang tidak berpenduduk tetapi desa itu juga mendapatkan geyuran dana dari pemerintah pusat untuk 74.957 desa yang ada di Indonesia. Desa tanpa penduduk yang kemudian diistilahkan dengan desa siluman penerima dana desa itu membuat sejumlah pihak meradang. Antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melalui Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi memastikan pihaknya akan menindaklanjuti temuan Menkeu tersebut. Jika dilihat dari tujuan awalnya, dana desa layak diapresiasi. Sebab, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (Priyasmoro, 2019).

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya konsep otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintahan. Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Isu tentang kinerja pemerintah daerah ini menjadi sorotan publik karena belum menunjukkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.

Implikasi positif dari berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama kepala daerah (Bupati dan Walikota). Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas. Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan internal control dan eksternal control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mahsun *et al.*, (2006:178) akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar informasinya. Selain itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Wulandari, 2013:178). Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Sehingga dalam hal ini akuntabilitas publik sangat penting untuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Seperti halnya akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah karena dengan adanya transparansi maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Coryanata (2007:41) mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran, dan mudah diakses serta tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara atau usulan rakyat, dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu adanya suatu pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, dan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Dimana pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat dan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian, *monitoring*, dan evaluasi. Tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-

prinsip *good governance*, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat secara efektif, efisien, dan ekonomis. Baswir (2004:138) menyatakan bahwa pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah dan pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu periode tertentu.

Peningkatan pelayanan publik merupakan wujud dari kinerja pemerintahan, dimana peningkatan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan dan yang terpenting yaitu bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah. Hasil penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dikaji secara parsial, ditemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja. Sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja. Penelitian Harvianda *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di SKPD. Sedangkan penelitian Laksana dan Handayani (2014) menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?; (2) Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?; (3) Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?. Sedangkan tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Untuk menguji dan menganalisis apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah; (2) Untuk menguji dan menganalisis apakah transparansi publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah; (3) Untuk menguji dan menganalisis apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah "suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan *agent* untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang yaitu pengambilan keputusan kepada *agent*". Tujuan utama teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak dengan tujuan untuk meminimalisasikan biaya sebagai dampak dari adanya sebuah informasi yang tidak simetris dan kondisi atas ketidakpastian.

Teori agensi berusaha untuk dapat menjawab masalah keagenan yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang berbeda. Eisenhardt (1989) dalam teori agensinya ditekankan agar dapat mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam suatu hubungan keagenan, yaitu: (1) Masalah keagenan yang muncul pada saat keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan *principal* dalam suatu *agent* saling berlawanan dan merupakan hal yang sangat sulit bagi *principal* untuk melakukan verifikasi apakah *agent* telah melakukan sesuatu dengan tepat; (2) Masalah pembagian dalam menanggung risiko yang akan timbul pada saat *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko.

Dalam pemerintahan yang demokrasi terdapat hubungan keagenan antara pemerintah sebagai penyedia informasi keuangan dan masyarakat sebagai pengguna informasi keuangan pemerintah. Akuntabilitas publik sebagai pemegang amanah (*agent*) mempunyai

tugas untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009:20). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (1) Akuntabilitas vertikal (*Vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR; (2) Akuntabilitas horizontal (*Horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas.

### **Organisasi Perangkat Daerah**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu perangkat pemerintahan daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang ada di Indonesia. Organisasi Perangkat Daerah melakukan pelaksanaan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik menurut dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

(1) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Indikator kinerja pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi operasional, dimana setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja yang dijadikan sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah; (3) Pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan suatu proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan, dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses pelayanan publik. Dalam mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang memiliki karakteristik yang relatif lebih rumit jika dibandingkan dengan indikator kinerja organisasi privat, dikarenakan indikator kinerja pada suatu pemerintah daerah non finansial lebih dominan dibandingkan indikator finansial; (4) Kinerja pemerintah daerah dalam lingkup organisasi merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang didalam suatu organisasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika. Menurut Bastian (2010:274) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategis planning*) suatu organisasi.

### **Pengawasan Fungsional**

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun lingkungan eksternal pemerintah dengan sasaran utama mencakup pelaksanaan tugas umum pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan. Pengawasan fungsional merupakan bagian terpenting pada praktik pengawasan di Indonesia. Fungsi dari pengawasan fungsional yaitu melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai

pelaksanaan dan kegiatan atau program yang terdapat dalam pemerintahan. Menurut Baswir (2000:137) menyatakan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Sedangkan menurut Halim (2002:351) mengemukakan bahwa pengawasan fungsional merupakan segala sesuatu dan bentuk tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang sudah ditetapkan.

### **Transparansi Publik**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009:30) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Dengan adanya transparansi pemerintah yang ditunjang dengan hukumnya yang jelas akan menambah wawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya penyimpangan atau penyelenggaraan dalam pengelolaan pemerintah. Menurut Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan serta kemudahan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

### **Akuntabilitas Publik**

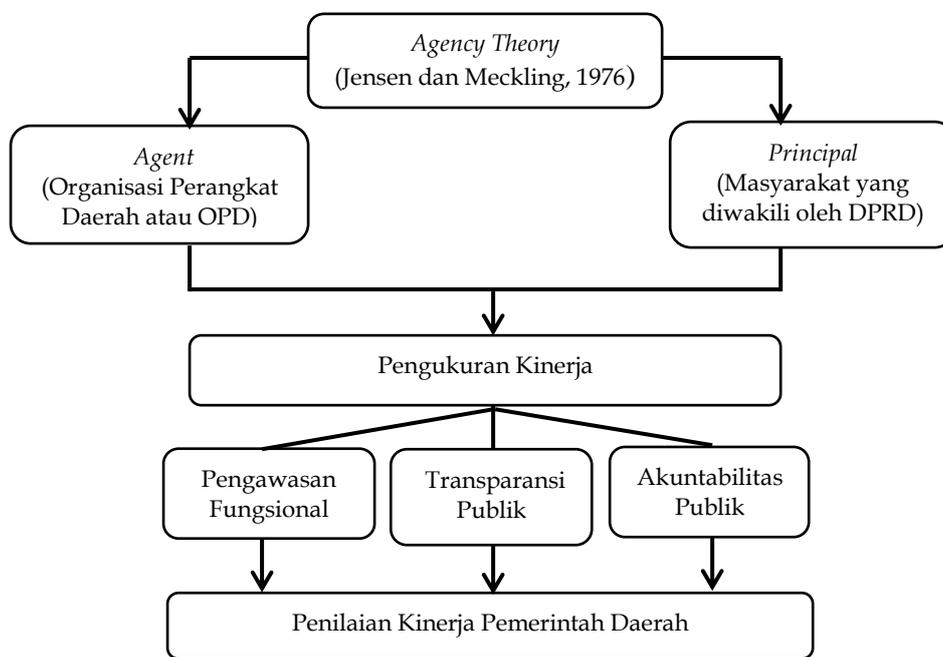
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004:226). Ruang lingkup akuntabilitas pemerintah didasarkan pada konsep demokrasi yang berarti bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, sehingga pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang telah banyak dilakukan oleh Auditya dan Lismawati (2013) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jitmau *et al.*, (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). Laksana dan Handayani (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang. Sadeli (2008) yang meneliti tentang Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap

Pelaksanaan Audit Pemerintahan Dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Sriwijayanti (2018) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD.

**Rerangka Pemikiran**



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

**Pengembangan Hipotesis**

**Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat dan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian, *monitoring*, dan evaluasi. Tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Baswir (2004:138) menyatakan bahwa pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah dan pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu periode tertentu.

*H<sub>1</sub>*: Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

**Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Menurut Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar bagi

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan serta kemudahan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

$H_2$ : Transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004:226).

$H_3$ : Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Berdasarkan jenis data, penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Alor dengan jumlah populasinya adalah sebanyak 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Variabel dari penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dimana pada variabel bebas terdapat pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik. Sedangkan pada variabel terikat terdapat kinerja pemerintah daerah.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel antara lain: (1) Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada semua lingkungan OPD Kabupaten Alor dan bekerja dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Alor yang menduduki jabatan minimal 1 tahun; (2) Dinas atau badan yang terdaftar dalam <http://www.jdih.alorkab.go.id> atau yang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016; (3) Menduduki jabatan sebagai Kasubbag, Subbag, Staf atau Kepala Pimpinan Dinas di OPD Kabupaten Alor.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Auditya dan Lismawati (2013:31) mengatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi dan dijawab oleh responden pegawai negeri yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Kuesioner tersebut berhubungan dengan pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik, dan kinerja pemerintah daerah. Setiap responden yang sudah diidentifikasi diberikan kuesioner dan tiga hari kemudian akan diambil dengan maksud jika responden memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait kuesioner akan bisa diberikan oleh peneliti.

## **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

### **Variabel Independen**

#### **Pengawasan Fungsional**

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun lingkungan eksternal pemerintah dengan sasaran utama mencakup pelaksanaan tugas umum pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan. Pengawasan fungsional merupakan bagian terpenting pada praktik pengawasan di Indonesia. Fungsi dari pengawasan fungsional yaitu melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan dan kegiatan atau program yang terdapat dalam pemerintahan. Menurut Laksana dan Handayani (2014:182) bahwa terdapat beberapa indikator pengawasan fungsional, yaitu: (1) Persiapan Pemeriksaan; (2) Pelaksanaan Pemeriksaan; (3) Pelaporan Pemeriksaan; (4) Tindak Lanjut Pemeriksaan.

#### **Transparansi Publik**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Krina (2003:17) menyatakan bahwa indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut: (1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab; (2) Kemudahan akses informasi; (3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; (4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

#### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Ruang lingkup akuntabilitas pemerintah didasarkan pada konsep demokrasi yang berarti bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, sehingga pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban. Mardiasmo (2002:21) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: (1) Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability For Probity And Llegality*); (2) Akuntabilitas Proses (*Proccess Accountability*); (3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*); (4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*).

### **Variabel Dependen**

#### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja pemerintah daerah merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Menurut Bastian (2006:19) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan disetiap OPD dalam membuat atau menyusun dan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aturan dan standar peraturan daerah yang berlaku. Dimensi dari variabel ini adalah: (1) Kesesuaian dengan standar pengelolaan keuangan; (2) Pencapaian target kinerja dari suatu program; (3) Pencapaian efisiensi operasional; (4) Ketepatan dan kesesuaian hasil; (5) Tingkat pencapaian

program; (6) Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat; (7) Moral perilaku pegawai.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk memecahkan masalah ataupun pengujian hipotesis.

### **Uji Validitas**

Ghozali (2016:52-53) menjelaskan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas menggunakan *pearson correlation* dengan bantuan program SPSS. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Setiap pertanyaan kuesioner dikatakan valid jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $< 0,05$ .

### **Uji Reliabilitas**

Ghozali (2016:47) menjelaskan uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengukuran *one shot*. Hasil dari pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain menggunakan *cronbach alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach alpha* ( $\alpha$ )  $> 0,60$ .

### **Uji Asumsi Klasik**

Dalam melakukan analisis data kuantitatif maka kita memerlukan suatu uji persyaratan. Uji analisis yaitu uji asumsi klasik yang merupakan suatu persyaratan pengujian statistik yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam analisis regresi linear. Dimana model dalam penelitian ini harus bebas dari asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:160). Untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: (a) Pendekatan grafik dengan melihat sebaran titik-titik mengikuti arah garis diagonal; (b) Pendekatan *Kolmogorov-Sminov* (*K-S*). Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji *K-S* dapat dilihat dari: (1) Jika nilai *Sig.* atau signifikansi normal atau probabilitas  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal; (2) Jika nilai *Sig.* atau signifikansi normal atau probabilitas  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dimana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Multikolinieritas dapat juga dilihat dari: (a) *Tolerance value* dan lawannya; (b) *Variance Inflation Factor* (*VIF*). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Pengujian multikolinearitas dapat

dilakukan sebagai berikut: (1) *Tolerance value* < 0,10 atau *VIF* > 10: terjadi multikolinearitas; (2) *Tolerance value* > 0,10 atau *VIF* < 10: tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan sebaliknya apabila *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait yaitu *ZEPRED* dengan residualnya *SRESID* dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (*Y* prediksi - *Y* sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis heterokedastisitas menurut (Ghozali, 2013:108) adalah sebagai berikut: (a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas; (b) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi yaitu dengan menggunakan metode analisis linear berganda. Dimana analisis regresi biasanya digunakan untuk meramalkan atau memperhatikan suatu nilai dalam hubungan dengan variabel lainnya yang mana dapat diketahui melalui garis persamaan regresinya. Tujuan dari model regresi linear berganda ini yaitu untuk mengestimasi suatu rata-rata populasi dan nilai variabel terikat (dependen) berdasarkan nilai pada variabel bebas (independen) yang diketahui besarnya (Ghozali, 2011:95). Rumus dari model regresi linear berganda itu sendiri adalah:

$$KP = \alpha + b_1PF_1 + b_2TP_2 + b_3AP_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- KP : Kinerja Pemerintahan Daerah (Variabel Dependen)
- $\alpha$  : Konstanta
- b : Koefisien Regresi (Nilai Peningkatan Atau Penurunan)
- PF : Pengawasan Fungsional (Variabel Independen)
- TP : Transparansi Publik (Variabel Independen)
- AP : Akuntabilitas Publik (Variabel Independen)
- $\varepsilon$  : *Error*

### Uji Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95-96). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ), jika nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas, tetapi jika nilai  $R^2$  mendekati satu berarti variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Ghozali (2016:96) mengatakan bahwa uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat  $\alpha$  sebesar 5%. Dasar dari pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yakni sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikan uji F > 0,05 maka model yang

digunakan dalam penelitian ini tidak layak atau tidak dapat dipergunakan dalam suatu analisis yang berikutnya; (2) Jika nilai signifikan uji  $F < 0,05$  maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan dalam analisis berikutnya.

### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Dengan kata lain, uji t merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam pengujian secara parsial yaitu dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Apabila nilai signifikansi uji  $t < 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel pegawai yang menduduki jabatan sebagai Kasubbag, Subbag, Staf atau Kepala Pimpinan Dinas yang berada pada lingkungan OPD Kabupaten Alor serta dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Peneliti memilih objek penelitiannya pada OPD yang berada di Kabupaten Alor dikarenakan sebagai organisasi sektor publik, kinerja pemerintah (OPD) haruslah berjalan dengan baik karena dengan begitu pemerintah dapat mencapai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi yang sudah ditetapkan bersama. Berikut ini daftar OPD Kabupaten Alor yang menjadi objek penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Objek Penelitian**

No	OPD Kabupaten Alor	No	OPD Kabupaten Alor
1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan	20	Dinas Perindustrian
2	Inspektorat Daerah	21	Dinas Perdagangan
3	Badan Kesbangpol	22	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Dinas Lingkungan Hidup	23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	25	Dinas Pemuda Dan Olahraga
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26	Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS
8	Dinas Pangan	27	Bagian Administrasi Pemerintahan
9	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	28	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
10	Rumah Sakit Umum Daerah	29	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
11	Dinas Pendidikan	30	Bagian Administrasi Pembangunan
12	Dinas Kesehatan	31	Bagian Administrasi Sumberdaya Alam
13	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	32	Bagian Administrasi Perekonomian
14	Dinas Perhubungan	33	Bagian Administrasi Hukum dan HAM
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	34	Bagian Administrasi Organisasi Tata Laksana
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35	Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan
17	Dinas Pekerjaan Umum	36	Sekretaris DPRD
18	Dinas Koperasi, UKM	37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	38	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPPT)

Sumber: Data Primer diolah, 2020

### Deskriptif Karakteristik Responden

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan data kuesioner yang telah disebar peneliti kepada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada Kabupaten Alor. Jumlah kuesioner yang dikirimkan sebanyak 38 kuesioner, sehingga total kuesioner yang dikirimkan sebanyak 38 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 38 koesioner, dengan demikian jumlah sampel penelitian ini sebanyak 38 kuesioner dengan distribusi sampel sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Pengumpulan Data**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner yang disebar	38	100%
Kuesioner tidak kembali	(0)	0%
Kuesioner cacat/rusak	(0)	0%
Total	38	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 responden. Berdasarkan kuesioner yang telah dikirim atau disebar kepada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Alor. Terdapat beberapa karakteristik responden yang meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, masa kerja/lama bekerja, dan jabatan.

Sebagian besar dari 38 responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 25 orang dengan persentase sebesar 70%. Sedangkan responden perempuan hanya 13 orang, yaitu dengan persentase sebesar 30%. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh laki-laki.

Sebagian besar dari 38 responden yang bekerja pada OPD Kabupaten Alor yang berusia 25-35 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 8%, berusia 36-45 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase 45%, berusia 46-55 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase sebesar 37%, dan untuk responden yang berusia di atas 55 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 10%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usia produktifitas masuk dalam kategori 36-55 tahun.

Sebagian besar dari 38 responden yang bekerja di OPD Kabupaten Alor yang memiliki ijazah SMA sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 10%, ijazah diploma (D3) sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 8%, ijazah sarjana (S1) sebanyak 28 orang dengan persentase sebesar 74%, sedangkan ijazah pasca sarjana (S2) sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 8%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki jenjang pendidikan terbanyak adalah ijazah sarjana (S1) yang memiliki tingkat pendidikan terakhir yang sangat baik.

Sebagian besar dari 38 responden yang bekerja di OPD Kabupaten Alor dengan lama bekerja 1-5 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 10%, lama bekerja 6-10 tahun sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 13%, lama bekerja 11-15 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 24%, lama bekerja 16-20 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 21%, dan untuk responden dengan lama bekerja diatas 21 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 32%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja terbanyak adalah pada masa kerja di atas 21 tahun.

Sebagian besar dari 38 responden yang bekerja di OPD Kabupaten Alor paling banyak menduduki jabatan sebagai Kasubbag dan Staf yang mana masing-masing berjumlah 8 orang dengan persentase sebesar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki jabatan yang sangat baik.

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data sehingga dapat menafsirkan kualitas data berupa jenis-jenis variabel yang digunakan dalam penelitian dan ringkasan statistik, seperti *mean*, *median*, modus, dan *standard deviasi*. Dalam kuesioner ini terdapat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk *skala likert* untuk masing-masing variabel. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik, dan kinerja pemerintah daerah. Dalam kuesioner tersebut terdapat 25 butir pertanyaan, diantaranya 6 butir pertanyaan untuk mewakili pengawasan fungsional, 5 butir pertanyaan untuk mewakili transparansi publik, 7 butir pertanyaan untuk mewakili akuntabilitas publik, dan 7 butir pertanyaan untuk mewakili kinerja pemerintah daerah.

Dalam kuesioner ini responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pandangan mereka tentang pengawasan fungsional, transparansi publik, akuntabilitas publik, dan kinerja pemerintah daerah dengan nilai 1 sampai 5, dimana 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS diperoleh hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 3  
Statistic Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
PF	38	22	30	981	25.82	2.154
TP	38	17	25	805	21.18	2.192
AP	38	24	35	1117	29.39	2.615
KP	38	25	35	1160	30.53	2.738
Valid N (listwise)	38					

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian analisis statistik deskriptif pada Tabel 3 di atas, variabel Pengawasan Fungsional (PF) memiliki nilai minimum sebesar 22 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,82 yang apabila dibagi dengan 6 (jumlah indikator pertanyaan pada kuesioner pengawasan fungsional) akan menghasilkan nilai 4,30 (hasil pembulatan) dengan *standar deviasi* sebesar 2,154. Artinya rata-rata responden memberikan skor 4 untuk *item/pertanyaan* pada kuesioner pengawasan fungsional.

Variabel Transparansi Publik (TP) memiliki nilai minimum sebesar 17 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,18 yang apabila dibagi dengan 5 (jumlah indikator pertanyaan pada kuesioner transparansi publik) akan menghasilkan nilai 4,24 (hasil pembulatan) dengan *standar deviasi* sebesar 2,192. Artinya rata-rata responden memberikan skor 4 untuk *item/pertanyaan* pada kuesioner transparansi publik.

Variabel Akuntabilitas Publik (AP) memiliki nilai minimum sebesar 24 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,39 yang apabila dibagi dengan 7 (jumlah indikator pertanyaan pada kuesioner akuntabilitas publik) akan menghasilkan nilai 4,20 (hasil pembulatan) dengan *standar deviasi* sebesar 2,615. Artinya rata-rata responden memberikan skor 4 untuk *item/pertanyaan* pada kuesioner akuntabilitas publik.

Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KP) memiliki nilai minimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30,53 yang apabila dibagi dengan 7 (jumlah indikator pertanyaan pada kuesioner kinerja pemerintah daerah) akan menghasilkan nilai 4,36 (hasil pembulatan) dengan *standar deviasi* sebesar 2,738. Artinya rata-rata responden memberikan skor 4 untuk *item*/pertanyaan pada kuesioner kinerja pemerintah daerah.

### Uji Validitas

Ghozali (2016:52-53) menjelaskan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas menggunakan *pearson correlation* dengan bantuan program SPSS. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Setiap pertanyaan kuesioner dikatakan valid jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $< 0,05$ . Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS diperoleh hasil analisis uji validitas sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	Korelasi	Signifikansi	N	Keterangan
Pengawasan Fungsional	PF 1	0,528	0,001	38	Valid
	PF 2	0,700	0,000	38	Valid
	PF 3	0,445	0,005	38	Valid
	PF 4	0,746	0,000	38	Valid
	PF 5	0,538	0,000	38	Valid
	PF 6	0,647	0,000	38	Valid
Transparansi Publik	TP 1	0,525	0,001	38	Valid
	TP 2	0,736	0,000	38	Valid
	TP 3	0,449	0,001	38	Valid
	TP 4	0,706	0,000	38	Valid
	TP 5	0,490	0,002	38	Valid
Akuntabilitas Publik	AP 1	0,731	0,000	38	Valid
	AP 2	0,603	0,000	38	Valid
	AP 3	0,652	0,000	38	Valid
	AP 4	0,535	0,001	38	Valid
	AP 5	0,358	0,027	38	Valid
	AP 6	0,749	0,000	38	Valid
	AP 7	0,556	0,000	38	Valid
Kinerja Pemerintah Daerah	KP 1	0,753	0,000	38	Valid
	KP 2	0,613	0,000	38	Valid
	KP 3	0,799	0,000	38	Valid
	KP 4	0,713	0,000	38	Valid
	KP 5	0,642	0,000	38	Valid
	KP 6	0,672	0,000	38	Valid
	KP 7	0,711	0,000	38	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa variabel Pengawasan Fungsional (PF), Transparansi Publik (TP), Akuntabilitas Publik (AP), dan Kinerja Pemerintah Daerah (KP) dapat dikatakan sebagai data yang valid karena nilai dari masing-masing variabel di atas menunjukkan nilai signifikansi  $< 0,05$ , sehingga data tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.

## Uji Reliabilitas

Ghozali (2016:47) menjelaskan uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengukuran *one shot*. Hasil dari pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain menggunakan *cronboach alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronboach alpha* ( $\alpha$ ) > 0,60. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS diperoleh hasil analisis uji reliabilitas sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Uji Reliabilitas**

Pertanyaan	Cronbach's alpha	Keterangan
PF	0,741	Reliabel
TP	0,732	Reliabel
AP	0,745	Reliabel
KP	0,774	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2020

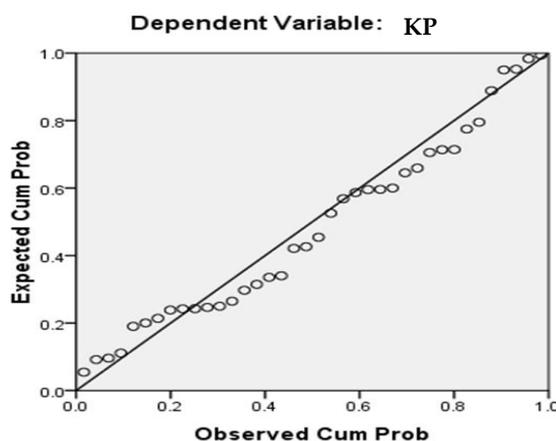
Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai variabel Pengawasan Fungsional (PF), Transparansi Publik (TP), Akuntabilitas Publik (AP), dan Kinerja Pemerintah Daerah (KP) dinyatakan sebagai data yang reliabel, yang mana nilai dari masing-masing variabel tersebut menunjukkan nilai *cronbach's alpha* > 0,60.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Pengujian normalitas dengan analisis grafik menggunakan grafik *normal probability plot*. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar lebih jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut adalah gambar hasil grafik normalitas dapat dilihat pada Gambar 2:

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**Gambar 2**

Grafik Uji Normalitas

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Dapat dilihat hasil grafik normalitas pada Gambar 2 di atas menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov* dilakukan untuk pengujian normalitas tidak bias, dengan syarat apabila nilai signifikansi di atas atau  $> 0,05$ , maka data residual terdistribusi normal. Hasil pengujian *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 6**  
**Uji Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Y
N		38
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	30.53
	Std. Deviation	2.738
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		.686
Asymp. Sig. (2-tailed)		.734

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji *kolmogorov-smirnov* pada Tabel 6 di atas maka dapat disimpulkan data yang diuji dengan metode *kolmogorov-smirnov* berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,734 > 0,05$ .

### Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $> 10$ , maka variabel tersebut mengindikasikan adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.051	5.075		1.980	.056		
PF	-.025	.207	-.020	-.122	.903	.666	1.500
TP	.158	.186	.126	.849	.402	.794	1.259
AP	.605	.181	.578	3.340	.002	.589	1.698

a. Dependent Variable: KP

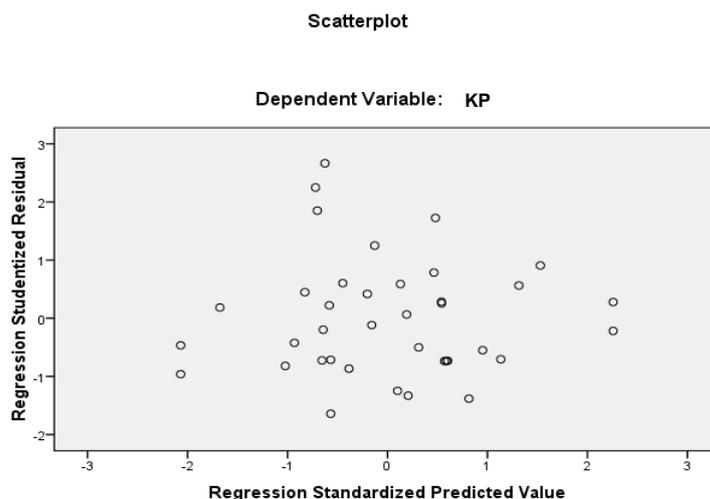
Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa nilai *VIF* dari variabel pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik menunjukkan nilai lebih dari 1 dan kurang dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas (tidak terjadi kolerasi antara variabel independen).

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi perbedaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika varian residual

dari satu pengamat ke pengamat lain tetap disebut homoskedastisitas dan sebaliknya jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 3:



**Gambar 3**  
**Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**  
**Sumber: Data Primer diolah, 2020**

Dapat dilihat hasil grafik heteroskedastisitas pada Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Fungsional (PF), Transparansi Publik (TP), Akuntabilitas Publik (AP) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KP). Berdasarkan hasil perhitungan dari model regresi linear berganda, diperoleh hasil persamaan regresi yang dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		
		B		Beta		
1	(Constant)	10.051	5.075		1.980	.056
	PF	-0.025	.207	-.020	-.122	.903
	TP	.158	.186	.126	.849	.402
	AP	.605	.181	.578	3.340	.002

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 8 di atas maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP = 10.051 - 0,025 PF + 0,158 TP + 0,605 AP + \epsilon$$

Persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan menunjukkan variabel pengawasan fungsional memiliki koefisien yang bertanda negatif. Sedangkan transparansi

publik dan akuntabilitas publik memiliki koefisien yang bertanda positif yang berarti variabel transparansi publik dan akuntabilitas publik meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghozali (2016:95-96) koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan sebuah variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian koefisien determinasi (Uji R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 9**  
**Hasil Koefisien Determinasi Berganda (Uji R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 <sup>a</sup>	.401	.348	2.211

a. Predictors: (Constant), PF, TP, AP  
b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 9 di atas menunjukkan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,348 yang berarti kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik terhadap variabel dependen kinerja pemerintah daerah sebesar 35% dan sisanya adalah sebesar 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini. Nilai R<sup>2</sup> tidak mendekati angka 1 hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

### Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Sehingga dapat dilihat apakah model masuk didalam kategori *fit* atau tidak. Kriteria pengujiannya adalah: (a) Jika nilai signifikan uji F > 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya; (b) Jika nilai signifikan uji F < 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. Hasil uji F dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 10**  
**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	111.254	3	37.085	7.586	.001 <sup>a</sup>
	Residual	166.219	34	4.889		
	Total	277.474	37			

a. Predictors: (Constant), PF, TP, AP  
b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa nilai tingkat signifikan uji kelayakan model (Uji F) sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cocok atau *fit*.

### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis, yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Prosedur pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi uji  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Artinya secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen; (b) Jika nilai signifikansi uji  $t < 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Artinya secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji t dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1 (Constant)	10.051	5.075		1.980	.056
PF	-.025	.207	-.020	-.122	.903
TP	.158	.186	.126	.849	.402
AP	.605	.181	.578	3.340	.002

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 11 di atas menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) Pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,903 > 0,05$  dan hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak; (2) Transparansi publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini juga dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,402 > 0,05$  dan hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak; (3) Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$  dan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak. Pernyataan ini diperkuat karena kuesioner pengawasan fungsional diberikan dan diisi oleh pegawai yang berada di dinas-dinas atau OPD dan bukan ditujukan langsung kepada badan inspektorat daerah selaku aparat pengawasan fungsional. Sehingga jawaban kuesioner tersebut belum dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, karena kurangnya sifat independensi aparat pengawasan fungsional, penilaian atas pengelolaan daerah dalam hal ini keuangan daerah serta hubungan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang dilakukan oleh instansi serta indikator kinerja yang belum maksimal untuk menilai keberhasilan suatu program. Hal ini sejalan dengan penelitian Laksana dan Handayani (2014). Sedangkan hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Baswir (2004) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa transparansi publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak. Pernyataan ini diperkuat karena peran transparansi kebijakan publik tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah dikarenakan tidak adanya keterbukaan anggaran terhadap masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan dalam hal ini anggaran masih kurang dan perlu diperbaiki. Maka dari itu menyebabkan masyarakat kurang mengetahui hasil dari pertanggungjawaban aparatur pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada beberapa instansi pemerintah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan terhadap publik karena laporan keuangan instansi pemerintah tersebut masih belum disajikan secara menyeluruh dan tertutup. Hal ini sejalan dengan penelitian Amelia *et al.*, (2013). Sedangkan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Sabarno (2007) yang menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. Hal ini berarti semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam OPD pemerintah Kabupaten Alor maka akan semakin meningkatkan kinerja. Akuntabilitas tinggi pada pengelolaan keuangan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. Dengan menjalankan asas akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Maka kualitas kinerja pemerintahan baik dari sisi finansial sehingga terwujudnya *good governance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Auditya dan Lismawati (2013) dan penelitian Harvianda *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil kuesioner yang dibagikan kepada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Alor maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Alor, dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dalam suatu OPD tidak dapat menjamin peningkatan kinerja pemerintah daerah; (2) Transparansi publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Alor, dapat diartikan bahwa dengan adanya transparansi publik dalam suatu OPD tidak dapat menjamin peningkatan kinerja pemerintah daerah; (3) Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Alor, dapat diartikan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik didalam lingkup pemerintahan daerah yang

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maka akan berpengaruh pada semakin baik tingkat kinerja pemerintah daerah.

### Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah maka keterbatasan penelitian ini sebagai berikut: (1) Karena keterbatasan waktu dan jarak kuesioner kemudian ditinggalkan disetiap OPD yang berdampak pada peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya; (2) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yaitu pengaruh pengawasan fungsional, pengaruh transparansi publik, dan pengaruh akuntabilitas publik.

### Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penerapan pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik pada OPD Kabupaten Alor dilakukan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dengan sempurna sehingga hal ini akan berdampak pada kurangnya kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Alor. Pemerintah Kabupaten Alor diharapkan untuk melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik agar kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Alor dapat terus meningkat; (2) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel independen lain yang memiliki pengaruh dalam memprediksi kinerja pemerintahan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M. F., dan I. P., Sudana. 2015. *Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. Bali. Indonesia. E-jurnal. ISSN:235202-8429.
- Auditya, L dan H. Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness 3(1). Bengkulu. 2013. Jurusan Akuntansi, Universitas Bengkulu, Indonesia.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Baswir, R. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3. BPFE: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta.
- Coryanata, I. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas. Makasar.
- Eisenhardt, K. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. Academy of Management Review, 14:57-74.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi pertama, Salemba Empat. Jakarta.

- Harvianda, Y. P., Surya, R. A. S, dan Azlina, N. 2014. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)*. JOM FEKON 1(2). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Hasnani, L. 2016. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengawasan Fungsional Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)*. Program Studi: Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru. Indonesia.
- Krina, L. L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Jensen, M. C. dan Meckling. W. H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Jitmau, F., L. Kalangi, dan L. Lambey. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Lambajang, A. A., D.P.E. Saerang, dan J. Morasa. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Wilayah Sulawesi Utara*. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unversitas Sam Ratulangi.
- Laksana A. P dan B. D. Handayani. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang*. *Accounting Analysis Journal*. Semarang. 2014. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Indonesia.
- Mahsun, M., S. Firma, dan Heribertus. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor*.
- Priyasmoro, M.R. 2019. *Dana Desa Siluman*. Liputan6.com. 12 November. Halaman 1. Jakarta.
- Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sadeli, D. 2008. *Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintah Dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. Bandung.
- Sriwijayanti, H. 2018. *Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD*. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 7(1):88. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Wulandari, I. 2013. *Pengaruh Pengawasan Fungsional dalam menunjang Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Padang*.